

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang perikanan. Mereka termasuk dalam sektor informal yang menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendapatan yang rendah, dan kurangnya jaminan sosial. Selain itu, ketergantungan pada faktor alam dan cuaca yang tidak menentu membuat mereka rentan terhadap fluktuasi hasil tangkapan, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi keluarga nelayan. Minimnya dukungan teknologi dan infrastruktur perikanan juga semakin memperburuk kondisi mereka, membatasi produktivitas serta daya saing di pasar yang semakin kompetitif (Satria, 2009).

Dalam konteks sosial ekonomi Indonesia, masyarakat nelayan umumnya terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional masih mengandalkan alat tangkap sederhana seperti perahu kayu, jaring, dan pancing, serta memanfaatkan pengetahuan lokal mengenai musim dan wilayah tangkap ikan. Aktivitas mereka terbatas pada perairan pesisir (*inshore fishing*) dengan skala produksi kecil yang umumnya ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga atau pasar lokal. Kelompok ini menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan modal, akses teknologi, perlindungan sosial, serta lemahnya posisi tawar dalam sistem ekonomi perikanan (Satria, 2009; Winarto & Choesin, 2014).

Sebaliknya, nelayan modern telah memanfaatkan teknologi perikanan yang lebih maju, seperti kapal bermotor berkapasitas besar, alat tangkap mekanis, sistem

pendingin ikan, serta perangkat navigasi dan deteksi ikan seperti GPS dan *fish finder*. Kelompok ini menjangkau wilayah tangkap yang lebih luas (*offshore fishing*), memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, serta akses terhadap pasar regional dan ekspor. Namun, modernisasi sektor perikanan tidak berlangsung secara merata, sehingga memperlebar kesenjangan struktural antara nelayan skala besar dan nelayan kecil tradisional, baik dari sisi akses sumber daya, modal, maupun peluang ekonomi (Todaro & Smith, 2020; Jaya, 2023).

Masyarakat pesisir sebagai komunitas sosial yang hidup di wilayah pantai memiliki karakteristik budaya, ekonomi, dan sosial yang khas. Kehidupan mereka sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir, seperti kegiatan penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil laut, dan aktivitas maritim lainnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap alam membentuk pola budaya, nilai sosial, serta karakter masyarakat pesisir yang adaptif, tangguh, dan berorientasi pada kerja kolektif. Namun, kondisi ekologis yang tidak stabil serta keterbatasan akses terhadap sumber daya pembangunan menjadikan masyarakat pesisir sebagai kelompok yang secara struktural rentan secara sosial dan ekonomi (Satria, 2019)

Dalam situasi ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada nelayan melalui berbagai kebijakan dan program bantuan. Bantuan tersebut meliputi penyediaan sarana produksi, perlindungan sosial, penguatan kelembagaan, serta program pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, dalam praktiknya, penyaluran bantuan masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan akses kelompok nelayan terhadap program bantuan, perbedaan tingkat kesiapan administratif dan teknis antar kelompok, serta mekanisme penyaluran yang berbasis proposal dan kuota

terbatas. Kondisi ini menyebabkan tidak semua kelompok nelayan dapat mengakses bantuan, meskipun berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang sama-sama rentan.

Kampung Kurnia yang terletak di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, merupakan salah satu kawasan pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan tradisional. Kehidupan ekonomi masyarakat kampung ini sangat bergantung pada hasil laut, terutama melalui aktivitas penangkapan ikan dan pengolahan ikan asin sebagai sumber utama penghidupan. Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, pemerintah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, seperti alat penjemuran ikan asin, timbangan, wadah penyimpanan ikan, alat deteksi ikan, serta bantuan administrasi dan kelembagaan. Secara normatif, bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat kapasitas usaha nelayan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

Perihal praktek di lapangan, pendistribusian bantuan pemerintah di Kampung Kurnia masih menunjukkan persoalan struktural. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, terlihat adanya ketimpangan dalam akses bantuan, yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketegangan sosial di kalangan nelayan. Situasi ini mencerminkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjamin distribusi bantuan yang adil dan kontekstual (Wijaya et al., 2024). Keluhan masyarakat nelayan juga menunjukkan bahwa sebagian nelayan yang berhak menerima bantuan justru tidak terjangkau program, sementara kelompok lain memperoleh bantuan lebih dari satu kali (iNews, 2024; Okezone, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan distribusi bantuan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga dengan mekanisme pendataan, seleksi

penerima, dan pengelolaan bantuan di tingkat lokal.

Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai wilayah pesisir lainnya. Penelitian Rangkuty (2022) di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa bantuan alat tangkap sering kali tidak didistribusikan secara adil sehingga tidak mampu mengurangi kerentanan ekonomi nelayan. Studi Bolkiah (2021) di Pamekasan menunjukkan bahwa bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Penelitian lain juga mengungkap rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program (Titaley & Nurhaeny, 2023) serta kuatnya pengaruh relasi sosial dalam penentuan penerima bantuan (Hamonangan, 2022). Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan dalam distribusi bantuan pemerintah masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan masyarakat pesisir (Jaya, 2023).

Meskipun telah banyak penelitian yang mengevaluasi efektivitas kebijakan bantuan pemerintah di sektor perikanan (Wijaya et al., 2024; Jaya, 2023), kajian yang menyoroti pengalaman konkret nelayan di tingkat komunitas lokal masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada analisis kebijakan secara makro, sementara dinamika sosial, makna bantuan, serta praktik pengelolaan bantuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan belum banyak dikaji secara mendalam (Alamsyah, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dinamika distribusi bantuan pemerintah kepada kelompok nelayan tradisional di Kampung Kurnia, Medan Belawan, dengan menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan program bantuan, aktor-aktor yang terlibat, serta bagaimana bantuan tersebut diterima, dimaknai, dan dikelola dalam

kehidupan sosial masyarakat nelayan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami bantuan pemerintah sebagai praktik sosial, bukan semata sebagai kebijakan administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bantuan nelayan tidak hanya terletak pada aspek distribusi dan ketepatan sasaran, tetapi juga pada dinamika internal kelompok, kapasitas kolektif, serta kesesuaian bantuan dengan konteks sosial, ekonomi, dan ekologis lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam perumusan kebijakan bantuan nelayan yang lebih adil, partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di masa mendatang.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama yang ingin dijawab:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah kepada kelompok Nelayan di Kampung Kurnia?
2. Bagaimana dampak sosial-ekonomi dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok Nelayan di Kampung Kurnia?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan program bantuan pemerintah kepada nelayan di Kampung Kurnia, termasuk proses distribusi, sistem seleksi, dan aktor-aktor kunci yang terlibat.

2. Menggali pengalaman dan persepsi masyarakat nelayan tradisional terhadap bantuan yang diterima, serta bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial mereka.
3. Mengevaluasi sejauh mana bantuan pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan secara nyata, serta mengidentifikasi tantangan struktural dalam implementasi bantuan di tingkat komunitas lokal.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

1. Menambah literatur dalam bidang antropologi maritim dan studi komunitas pesisir, khususnya terkait relasi antara kebijakan publik dan struktur sosial lokal.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi pesisir dan efektivitas kebijakan sosial pemerintah.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi bahan evaluasi dalam merancang dan melaksanakan program bantuan yang lebih adil, tepat sasaran, dan partisipatif di wilayah pesisir.
2. Bagi masyarakat nelayan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak mereka dalam memperoleh bantuan secara adil dan mewakili suara nelayan terkait efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam menerima bantuan pemerintah.

3. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan sosial di wilayah pesisir dan efektivitas bantuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.